

PERINGATI HARI JADI KE-193 PURWOREJO, PEMKAB PURWOREJO RESMIKAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DI 2023



Sumber Gambar:

<https://www.purworejokab.go.id/web/cni-content/uploads/modules/posts/2024-02-26%20at%2017.36.49.jpeg>

Isi Berita:

RADAR PURWOREJO - Di peringatan Hari Jadi ke-193 Kabupaten Purworejo ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo gelar 16 rangkaian kegiatan. Peresmian proyek-proyek pembangunan Kabupaten Purworejo di 2023 dijadikan salah satu rangkaian kegiatan hari jadi tersebut.

Prosesi peresmian proyek-proyek tersebut dilakukan pada Senin (26/2) di Stadion Sarwo Edhie Wibowo (SEW). Pun, dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana untuk menyerahkan bantuan keuangan dan bantuan pangan, meresmikan proyek pembangunan, serta melakukan panen raya padi di Desa Tunjungan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.

Adapun proyek yang diresmikan berjumlah 12 paket pekerjaan. Yakni, dua diresmikan oleh PJ Gubernur Jateng dan sepuluh paket diresmikan oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti. "Selama 2023 lalu, Pemkab Purworejo telah melaksanakan 131 paket pekerjaan. Namun, secara simbolis yang diresmikan 12 paket," ujarnya Senin (26/2).

Sebanyak 12 proyek tersebut antara lain, Stadion SEW sekitar Rp 10,7 miliar, Jembatan Sedayu 3 (ruas Jalan Banyuasin-Pagerharjo) sekitar Rp 5,96 miliar, revitalisasi Pasar Pituruh sekitar Rp 9,6 miliar, Terminal Penumpang Tipe C Purworejo sekitar Rp 2,5 miliar, rehab Gedung Sekretariat DPRD Purworejo sekitar Rp 3,19 miliar, pembangunan gedung Kelurahan Kledung Karangdalem sekitar Rp 2,79 miliar.

Kemudian, revitalisasi UPT BLK Purworejo sekitar Rp 1,98 miliar, pembangunan Unit Kemasan dan Unit Administrasi Rumah Kemasan sekitar Rp 4,36 miliar, peningkatan Jalang Kalimeneng, Purbayan, sekitar Rp 3,39 miliar, peningkatan Jalan Kemiri, Pakisarum sekitar Rp 3,44 miliar, revitalisasi SMP N 10 Purworejo sekitar Rp 3,37 miliar, dan revitalisasi SDN Jati Kecamatan Bener sekitar Rp 1,4 miliar.

Yuli berharap, proyek yang sudah terbangun tersebut dapat digunakan, dijaga, dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. "Kami sangat berterima kasih khususnya atas bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat bagi masyarakat," ucap dia.

Dalam peresmian tersebut, Yuli juga menyampaikan terkait kemiskinan ekstrem. Dia menyebut, dalam tiga tahun terakhir kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo terus mengalami penurunan. "Di 2020 kemiskinan ekstrem masih 1,28 persen, di 2021 turun menjadi 1,27 persen, dan 2022 turun lagi menjadi 1,08 persen," sebutnya.

Disampaikan, penanganan pada 2023, sudah dialokasikan anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terealisasi sebesar Rp 244,38 milyar. Dengan rincian, Rp 141,76 milyar dari APBN dan Rp 102,62 milyar dari APBD. "Kami juga mencari bantuan CSR dan dukungan Baznas untuk ikut dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," imbuh dia.

Menurut Yuli, Pemkab Purworejo telah berhasil membereskan empat dari delapan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Antara lain, rumah tidak layak huni (RTLH), anak tidak sekolah, stunting, dan disabilitas. Sedang, empat aspek yang belum tercapai optimal yaitu jamban, listrik, air bersih, dan anggota rumah tangga tidak bekerja.

"Namun, kami akan terus berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem sesuai visi misi Kabupaten Purworejo," ujar dia. Selain kemiskinan ekstrem stunting juga menjadi salah satu prioritas. Beberapa upaya akan dilakukan di 2024 untuk mengatasi stunting seperti program pembinaan keluarga berencana pengembangan sistem penyediaan air minum, dan sebagainya. "Di 2024 kami menargetkan ada penurunan stunting sebesar 7,8 persen atau turun dari 2023 sebesar 7,9 persen," kata dia.

Sementara, PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana sangat mengapresiasi bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo di bawah rata-rata Provinsi Jateng. "Kami berharap itu dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. APBD sasarannya juga harus jelas, yang menjadi prioritas adalah pengentasan kemiskinan," tandasnya. (han)

Sumber Berita:

1. <https://radarpurworejo.jawapos.com/purworejo-24-jam/2144375700/peringati-hari-jadi-ke-193-purworejo-pemkab-purworejo-resmikan-proyek-proyek-pembangunan-di-2023>, “Peringati Hari Jadi ke-193 Purworejo, Pemkab Purworejo Resmikan Proyek-Proyek Pembangunan di 2023”, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3150/pj-gubernur-serahkan-bantuan-pangan-dan-resmikan-sejumlah-proyek>, “Pj Gubernur Serahkan Bantuan Pangan dan Resmikan Sejumlah Proyek”, tanggal 26 Februari 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.³

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi